

Pertumbuhan Keuangan Syariah Di Asia Tenggara: Tantangan Dan Peluang Untuk Indonesia

Hurriah Ali Hasan

Universitas Muhammadiyah Makassar

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Hurriah Ali Hasan

E-mail: hurriahalihasan@unismuh.ac.id

Abstract

Islamic finance has made a significant impact on the global financial system, with the GCC countries at the forefront of its development. This article discusses the mechanisms, challenges, and strategies used in the GCC countries and explores their relevance and adaptability in the Indonesian economic context. It highlights the structural elements, regulatory frameworks, and financial instruments that drive the success of Islamic finance in the GCC. It also proposes strategic initiatives for Indonesia, emphasizing education, policy refinement, and innovative instruments, to strengthen its position in the global Islamic financial market.

Keywords: *Islamic Finance, global finance, financial instruments.*

Abstrak

Keuangan syariah telah memberikan pengaruh signifikan pada sistem keuangan global, dengan negara-negara GCC berada di garis depan perkembangannya. Artikel ini membahas mekanisme, tantangan, dan strategi yang digunakan di negara-negara GCC serta mengeksplorasi relevansi dan adaptabilitasnya dalam konteks ekonomi Indonesia. Artikel ini menyoroti elemen struktural, kerangka regulasi, dan instrumen keuangan yang mendorong keberhasilan keuangan syariah di GCC. Artikel ini juga mengusulkan inisiatif strategis untuk Indonesia, dengan menekankan pada pendidikan, penyempurnaan kebijakan, dan instrumen inovatif, untuk memperkuat posisinya di pasar keuangan syariah global.

Kata Kunci: *Keuangan Syariah, keuangan global, instrumen keuangan.*

PENDAHULUAN

Keuangan syariah telah muncul sebagai salah satu komponen penting dalam sistem keuangan global. Praktik keuangan ini dicirikan oleh kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti pelarangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan mendorong aktivitas yang berbasis etika serta berbagi risiko. Negara-negara GCC (Global Citizenship Education Cooperation Center), yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan UEA, memanfaatkan kekayaan mereka dari sumber daya hidrokarbon untuk merintis pengembangan keuangan syariah yang kini menjadi acuan di tingkat global (Kol & Tekdoğan, 2024).

Sejak era 1970-an, negara-negara GCC telah mengambil langkah-langkah strategis untuk melembagakan keuangan syariah melalui pembentukan bank syariah pertama, regulasi berbasis syariah, dan pengenalan instrumen keuangan seperti sukuk dan takaful. Sebagai hasilnya, kawasan ini kini menguasai sekitar 40% dari total aset keuangan syariah dunia. Bahrain, misalnya, dikenal dengan lembaga-lembaga standarisasi seperti AAOIFI yang telah menetapkan panduan global untuk praktik keuangan syariah (Sori & Ahmad, 2024). Arab Saudi, dengan Islamic Development Bank (IDB), juga menjadi penggerak utama dalam menyediakan pembiayaan berbasis syariah untuk pembangunan.

Di sisi lain, Indonesia, meskipun memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, belum sepenuhnya memanfaatkan potensi keuangannya. Pada 2022, pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan total sistem keuangan nasional. Keterbatasan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk rendahnya literasi keuangan syariah, kurangnya inovasi produk, dan keterbatasan infrastruktur pendukung.

Namun, potensi Indonesia sangat besar. Dengan jumlah penduduk Muslim yang signifikan dan komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemimpin dalam keuangan syariah global (Hasan, HA; Pagalung, G; Kara, 2022). Artikel ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengkaji pengalaman negara-negara GCC, mengeksplorasi relevansi strategi mereka, dan memberikan rekomendasi untuk diterapkan di Indonesia.

Secara khusus, artikel ini akan membahas bagaimana kerangka regulasi yang kuat, inovasi produk keuangan, dan investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat mendorong pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia. Pembelajaran dari GCC dapat menjadi panduan strategis untuk meningkatkan daya saing dan relevansi Indonesia di pasar keuangan syariah internasional. Dengan pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan akademisi, Indonesia dapat memanfaatkan potensinya

secara maksimal dan mendukung perkembangan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif kualitatif, menganalisis data dari laporan GCC dan membandingkannya dengan lanskap keuangan syariah di Indonesia. Fokus utama mencakup kerangka regulasi, peran institusi, instrumen keuangan, dan infrastruktur pendidikan. Data berasal dari laporan utama negara GCC dan literatur sekunder tentang sistem keuangan Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Kerangka Kelembagaan

Negara-negara GCC memiliki sistem kelembagaan yang kuat yang menjadi dasar keberhasilan keuangan syariah di kawasan tersebut. Salah satu contohnya adalah Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) di Bahrain. AAOIFI berperan penting dalam mengembangkan standar akuntansi dan audit yang sesuai syariah, yang diadopsi secara luas oleh lembaga keuangan syariah di seluruh dunia. Selain itu, lembaga ini juga menetapkan standar syariah yang menjadi pedoman bagi berbagai institusi keuangan syariah.

Arab Saudi, sebagai pusat keuangan syariah lainnya, memiliki Islamic Development Bank (IDB) yang memainkan peran strategis dalam pembiayaan pembangunan di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). IDB tidak hanya memberikan pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan dan beasiswa dalam bidang ekonomi syariah (Lias, 2024).

Selain itu, Qatar Financial Centre dan Central Bank of UAE juga menjadi contoh institusi yang berhasil menciptakan kerangka regulasi yang mendukung pertumbuhan keuangan syariah. Mereka menyediakan panduan yang jelas bagi operasional lembaga keuangan syariah, termasuk dalam penerbitan sukuk dan pengelolaan takaful. Infrastruktur kelembagaan seperti ini memungkinkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan syariah.

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) menjadi lembaga utama yang menetapkan fatwa-fatwa syariah bagi produk dan layanan keuangan syariah. Namun, DSN masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan regulasi lokal dengan standar internasional, seperti yang telah dilakukan oleh

AAOIFI. Kolaborasi internasional dengan lembaga-lembaga seperti AAOIFI dan IDB dapat membantu DSN memperkuat kapasitasnya.

Penting juga untuk mencatat bahwa negara-negara GCC memiliki kemitraan erat antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung keuangan syariah. Contohnya adalah pendirian lembaga seperti Liquidity Management Centre di Bahrain, yang membantu bank-bank syariah mengelola likuiditas mereka dengan lebih efektif. Indonesia dapat mencontoh inisiatif ini dengan membentuk pusat manajemen likuiditas syariah yang terintegrasi.

Selain itu, pendidikan memainkan peran penting dalam mendukung kerangka kelembagaan (Mokala, dkk, 2024). Negara-negara GCC memiliki program pendidikan dan pelatihan yang dirancang khusus untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor keuangan syariah. Institusi seperti Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF) menawarkan program diploma dan pelatihan profesional yang relevan. Indonesia dapat mengembangkan pusat pelatihan serupa untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten di bidang keuangan syariah.

Dengan memperkuat kerangka kelembagaan melalui kolaborasi internasional, inovasi regulasi, dan investasi dalam pendidikan, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di pasar keuangan syariah global. Kerangka kerja yang kuat akan memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan sektor ini secara jangka panjang.

2. Instrumen Keuangan

Negara-negara GCC telah mengembangkan dan memanfaatkan berbagai instrumen keuangan syariah yang inovatif. Salah satu instrumen utama adalah sukuk, yang digunakan baik untuk tujuan komersial maupun pembangunan infrastruktur. Arab Saudi, misalnya, memimpin penerbitan sukuk global dengan 51% dari total pangsa GCC. Sukuk jenis ini sering kali digunakan untuk membiayai proyek besar seperti pengembangan energi dan transportasi.

Selain sukuk, takaful atau asuransi syariah juga memainkan peran penting dalam sistem keuangan GCC. Negara seperti UEA memiliki perusahaan takaful besar yang menawarkan berbagai produk, termasuk asuransi kesehatan, properti, dan kendaraan. Takaful didasarkan pada prinsip berbagi risiko, yang sejalan dengan nilai-nilai syariah dan menarik bagi populasi Muslim.

Instrumen lain yang berkembang adalah wakaf produktif, yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek sosial dan ekonomi. Beberapa negara GCC telah memanfaatkan dana wakaf untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Misalnya, Kuwait

menggunakan dana wakaf untuk membangun universitas dan rumah sakit berbasis syariah.

Di Indonesia, sukuk negara telah menjadi salah satu instrumen yang paling menonjol. Namun, masih ada ruang untuk diversifikasi instrumen lainnya. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari GCC dengan mengadopsi model sukuk hibrida yang menggabungkan elemen pembiayaan syariah dan konvensional. Selain itu, pengembangan takaful dan wakaf produktif dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan inklusi keuangan.

Inovasi lain yang dapat diadopsi Indonesia adalah fintech syariah. Di GCC, platform digital telah digunakan untuk memperluas akses ke produk keuangan syariah, seperti crowdfunding berbasis syariah dan pembayaran zakat online. Dengan populasi muda yang melek teknologi, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan fintech syariah yang dapat menjangkau masyarakat luas.

Dengan memanfaatkan berbagai instrumen keuangan ini, Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga memperkuat posisi pasar keuangan syariah di tingkat global. Diversifikasi produk dan inovasi berbasis teknologi akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini.

3. Pendidikan dan Pelatihan

Negara-negara GCC telah menunjukkan keberhasilan dalam membangun kapasitas melalui program pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi untuk mendukung sektor keuangan syariah. Institusi seperti Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF) menjadi pionir dalam menyediakan pelatihan khusus untuk profesional, termasuk program diploma dan kursus singkat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri. BIBF juga bekerja sama dengan universitas terkemuka untuk menawarkan gelar sarjana dan pascasarjana dalam keuangan syariah, memastikan bahwa lulusan memiliki keahlian teoritis dan praktis.

Selain BIBF, Arab Saudi melalui Islamic Development Bank (IDB) juga menyediakan pelatihan berorientasi global dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia di sektor syariah. Program-program IDB meliputi beasiswa, seminar, dan lokakarya yang mencakup berbagai topik seperti manajemen risiko syariah, audit, dan inovasi produk keuangan.

Di UEA, institusi seperti Emirates Institute for Banking and Financial Studies (EIBFS) menawarkan program pendidikan yang berfokus pada prinsip-prinsip syariah dan aplikasi praktisnya di sektor perbankan. Program ini sering kali diakreditasi oleh badan internasional, memastikan bahwa peserta pelatihan memperoleh sertifikasi yang diakui secara global.

Di Indonesia, pendidikan keuangan syariah masih terfragmentasi, dengan sedikit institusi yang menawarkan program yang dirancang secara

khusus untuk memenuhi kebutuhan industri. Universitas seperti UIN Jakarta dan Institut Tazkia telah menawarkan program studi terkait, tetapi skalanya masih terbatas. Untuk mempercepat pengembangan kapasitas, Indonesia dapat mengadopsi model BIBF dengan membangun pusat pelatihan nasional yang berfokus pada keuangan syariah.

Selain itu, kolaborasi antara universitas dan industri sangat penting untuk menciptakan kurikulum yang relevan dan mutakhir. Kursus-kursus singkat yang berorientasi pada praktik, seperti pelatihan dalam audit syariah dan pengelolaan risiko, juga dapat menarik minat profesional yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang keuangan syariah.

Penting juga untuk memanfaatkan teknologi dalam pendidikan. Platform e-learning dapat digunakan untuk menyediakan akses yang lebih luas ke kursus-kursus keuangan syariah, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil. Dengan pendekatan ini, pendidikan keuangan syariah dapat menjangkau lebih banyak individu dan memberikan dampak yang lebih besar.

Dengan memperkuat pendidikan dan pelatihan, Indonesia dapat memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing di pasar keuangan syariah global. Pendidikan yang terintegrasi dan inovatif akan menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung pertumbuhan sektor ini.

Keberhasilan negara-negara GCC dalam mengembangkan keuangan syariah memberikan pelajaran penting yang relevan untuk konteks Indonesia. Salah satu faktor kunci adalah dukungan penuh dari pemerintah dalam membangun kerangka regulasi yang mendukung dan ekosistem yang inklusif. Negara-negara GCC seperti Bahrain dan Arab Saudi menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dan terpusat dapat mendorong transparansi dan memperkuat kepercayaan investor. Dalam konteks Indonesia, peningkatan regulasi yang berfokus pada pengawasan syariah, transparansi, dan akuntabilitas dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini.

Di sisi lain, inovasi produk juga memainkan peran penting. Negara-negara GCC telah memperkenalkan berbagai instrumen keuangan seperti sukuk hibrida, takaful, dan produk wakaf produktif yang menjawab kebutuhan spesifik masyarakat Muslim. Indonesia dapat mengambil inspirasi dari praktik ini dengan menciptakan produk keuangan syariah yang lebih beragam dan relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan memperkenalkan inovasi seperti fintech syariah, crowdfunding zakat, atau platform wakaf digital, sektor ini dapat memperluas jangkauan dan inklusi keuangan di Indonesia.

Pendidikan dan pengembangan kapasitas juga menjadi pilar penting dalam mendukung keuangan syariah. GCC telah berhasil membangun institusi pendidikan yang menyediakan pelatihan berkualitas tinggi untuk profesional di sektor ini. Model seperti Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF) dapat direplikasi di Indonesia untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten

dan berdaya saing. Selain itu, kolaborasi antara universitas, lembaga keuangan, dan regulator dapat menciptakan kurikulum yang relevan dan mutakhir.

Namun, penting untuk mempertimbangkan konteks lokal Indonesia yang unik. Dengan populasi besar yang tersebar di berbagai pulau, pendekatan berbasis teknologi menjadi krusial. Negara-negara GCC telah menunjukkan potensi besar dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung sektor keuangan syariah, seperti melalui platform digital untuk distribusi sukuk atau pengelolaan dana wakaf. Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah melalui aplikasi pendidikan atau kampanye digital.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia dapat belajar dari pengalaman GCC dalam mendorong kemitraan publik-swasta untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek besar seperti infrastruktur atau energi terbarukan. Selain itu, promosi keuangan syariah sebagai bagian dari strategi nasional dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, pelajaran dari GCC menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam pasar keuangan syariah global. Kombinasi antara regulasi yang kuat, inovasi produk, pendidikan yang terintegrasi, dan pemanfaatan teknologi dapat menjadi kunci keberhasilan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di sektor ini

PENUTUP

Pengalaman negara-negara GCC dalam keuangan syariah memberikan cetak biru bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensinya. Dengan menyempurnakan kerangka regulasi, mendorong pendidikan, dan memperkenalkan instrumen inovatif, Indonesia dapat memposisikan dirinya sebagai pemimpin global dalam keuangan syariah. Artikel ini menekankan pentingnya upaya kolaboratif antara pembuat kebijakan, lembaga keuangan, dan akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akkaş, E. (2017). An Overview of Islamic Economics and Finance in the GCC Countries. IKAM Reports.
- Hasan, HA; Pagalung, G; Kara, M. (2022). Determinan Rate of Return pada Perbankan Syariah. *Adz Dzahab, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 160–172.
- Islamic Financial Services Board. (2016). Islamic Financial Services Industry Stability Report.
- Kol, Nazlı and Tekdoğan, Ömer Faruk . (2024) Contemporary Issues In Islamic Jurisprudence. Kemeraltı-Konak/İzmir: Duvar Yayınları
- Lias, Aida. (2024). Importance of standards of Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). *International journal of economic perspectives*, Vol. 18 No. 1, pp. 310–346.
- Mokala, M.N.; Ahmad, Z.; Zulfakac, A.; Rifasd, A.H (2024). Murabaha & Tawarruq: An Examination of Issues and Challenges from an Accounting Perspective. *Journal of Islamic Finance*, Vol. 13 No. 1 pp. 42-56
- Sori, Z. M., & Ahmad, M. H. S. (2024). Navigating Reporting Diversity: Impact on Signaling Islamic Contract Values in Banks Adopting AAOIFI and IASB Standards. *Proceedings of the 2nd International Conference on Accounting and Business (ICAB-2024)*. Universiti Teknologi Mara, Perak Branch, Tapah Campus, Malaysia